

PENDAMPINGAN MENUJU DESA WISATA BANJARSARI BERBASIS POTENSI LOKAL

Adji Suradji Muhammad^{1*}, Sugiyanto², Supardal³

^{1*,2,3}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Jl. Timoho No 317 Kota Yogyakarta, Indonesia

e-mail: adji.suradji@apmd.ac.id^{1*}, probosugiyanto@gmail.com², gusdal66@gmail.com³

Received : Oktober, 2024

Accepted : Oktober, 2024

Published : Oktober, 2024

Abstrak

Pariwisata merupakan salahsatu aktifitas perekonomian yang mampu menjadi daya ungkit bagi kesejahteraan masyarakat. Pariwisata memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui aktifitas kepariwisataan, beragam potensi dapat ditumbuhkembangkan mulai dari penyerapan tenaga kerja, pemasaran produk kuliner dan souvenir hingga pada upaya pelestarian alam dan lingkungan. Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan Kalurahan Banjarsari dalam mewujudkan Desa Wisata yang ramah lingkungan berdasarkan potensi lokal. Metode yang digunakan dalam pengabdian yaitu dengan melakukan observasi partisipatoris guna mengidentifikasi potensi local desa yang menunjang terwujudnya Desa Wisata. Data dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dokumen serta wawancara dengan berbagai pihak yang terkait langsung dengan rencana pembentukan Desa Wisata mulai dari Lurah beserta perangkatnya, Kelompok Sadar Wisata Mustika Banjar serta tokoh-tokoh masyarakat. Adapun tahapan Pengabdian dimulai dari identifikasi potensi, sosialisasi terhadap siteplan sebagai bagian dari Masterplan Desa Wisata dan Evaluasi Perencanaan. Hasil Pengabdian menemukan bahwa ada keinginan kuat dari Lurah beserta perangkatnya serta masyarakat atas terwujudnya Desa Wisata. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan masyarakat dengan swadaya membangun dan memamatkan Puncak Sigong sebagai salahsatu objek Wisata desa. Disamping itu Tim Pengabdian juga menemukan bahwa Pokdarwis belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya karena kurangnya rasa percaya diri dalam mengelola potensi yang ada.

Kata kunci: Pendampingan, Desa Wisata, Potensi Lokal.

Abstract

Tourism is one of the economic activities that can be a leverage for community welfare. Tourism plays an important role in efforts to realize community welfare. Through tourism activities, various potentials can be developed, starting from employment, marketing of culinary products and souvenirs to efforts to preserve nature and the environment. This service aims to assist Banjarsari Village in realizing an environmentally friendly Tourism Village based on local potential. The method used in the service is by conducting participatory observations to identify the local potential of the village that supports the realization of the Tourism Village. Data was collected by conducting document searches and interviews with various parties directly related to the plan to form a Tourism Village starting from the Head of Village and his apparatus, the Mustika Banjar Tourism Awareness Group and community leaders. The stages of the Service began with the identification of potential, socialization of the siteplan as part of the Tourism Village Master Plan and Planning Evaluation. The results of the Service found that there is a strong desire from the Lurah and his apparatus as well as the community for the realization of a Tourism Village. This is supported by the existence of community activities by self-help building and finalizing Sigong Peak as one of the village tourism objects. In addition, the Service Team also found that Pokdarwis has not maximized its duties and functions due to a lack of confidence in managing existing potential.

Keywords: Assistance, Tourism Village, Local Potential

Pendahuluan

Banjarsari merupakan salahsatu kalurahan (sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta) dan berada di dataran tinggi perbukitan Menoreh Kabupaten Kulon Progo. Selain berada di dataran

tinggi, Banjarsari juga merupakan kalurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Sebagai kalurahan yang berada jauh dari pusat kota, namun memiliki segudang potensi. Beberapa potensi yang dapat dipotret diantaranya

adalah potensi alam yang dimiliki oleh Banjarsari dan berstatus sebagai Tanah Kas Desa atau TKD. TKD yang berada di ketinggian tersebut seluas kurang lebih 2 hektar dengan view yang menarik.

Pada tahun 2021, Kalurahan Banjarsari mendapatkan tantangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berupa pemberian piagam penghargaan sebagai Desa Wisata. Piagam tersebut ditandatangani

langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pada tanggal 20 Juli 2021. Namun hingga tahun 2024, Kalurahan Banjarsari belum mampu mewujudkan tantangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya yang ada serta keberanian untuk memulai aktifitas kepariwisataan.



Gambar 1: Piagam Penghargaan Sebagai Desa Wisata
(Sumber: Dokumentasi Pemerintah Kalurahan, 2024)

Apa yang menjadi tantangan dari Menparekraf tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur D.I.Yogyakarta dimana pada tahun 2017 Pemerintah Provinsi D.I.Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Dalam Perda No 3 Tahun 2017 tersebut disebutkan bahwa Desa atau Kalurahan memiliki tanggungjawab dalam memelihara dan mengembangkan Objek Kebudayaan. Amanah tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 19 yang menyatakan bahwa Desa/Kelurahan Budaya atau sebutan lain adalah desa/kelurahan yang memelihara dan mengembangkan Objek Kebudayaan yang dimilikinya meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni.

Pembentukan Perda tersebut bertujuan untuk memberikan penguatan kewenangan kepada Pemerintah Kalurahan/Desa untuk melestarikan

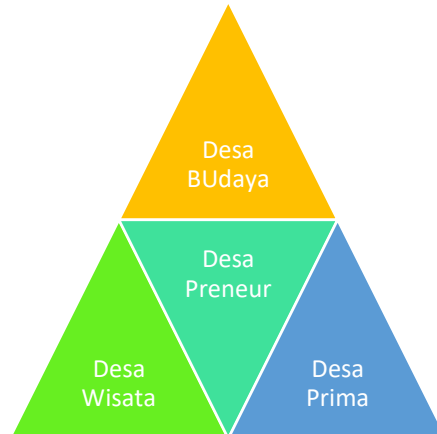
objek kebudayaan yang ada di desa masing-masing. Pelestarian merupakan bentuk kegiatan yang berupaya menjaga keberlangsungan. Pelestarian menjadi nafas yang sejalan dengan tujuan dibentuknya Desa Wisata (Rahmah, 2017; Sugianto, 2016; Sutrisno et al., 2018).

Hal senada juga diungkapkan oleh Oktaviana dan Dewi Nurwati yang menyatakan bahwa salahsatu tujuan Desa Wisata adalah untuk menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada (Dewi Nurwati, 2020; Oktaviana et al., 2021). Konsep pelestarian dalam Desa Wisata juga senada dengan semangat pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Peraturan Gubernur tersebut dibuat dalam upaya untuk menselarakan dan mensinergikan pembangunan mulai dari tingkat Provinsi hingga ketingkat Desa atau Kalurahan.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pertimbangan diterbitkannya pergun khususnya pada poin c yang berbunyi salah satu upaya

menynergikan dan menyelaraskan aktivitas pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan melalui pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Sebelum ditetapkan menjadi Desa Mandiri Budaya, desa-desa dituntut untuk memenuhi 4 (empat) kriteria dasar yang akan menjadi pilar untuk menaikkan status desa hingga menjadi Desa Mandiri Budaya (DMB).

Keempat pilar tersebut adalah Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Ke-empat pilar tersebut tidak harus berurutan dalam mewujudkannya, namun sesuai dengan potensi dan kesiapan para pelaku atau aktor-aktornya (Atmajha et al., 2022; Muhammad et al., 2022).



Gambar 2: Empat Pilar Menuju Desa Mandiri Budaya (Sumber: Data diolah, 2024)

Ke-empat pilar tersebut diatas sebagai pilar pendukung tercapainya Desa Mandiri Budaya yang menjadi status tertinggi bagi desa/kalurahan di Yogyakarta.

Metode

Metode yang digunakan dalam Pengabdian ini adalah dengan menggunakan observasi partisipatoris. Observasi partisipatoris merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara

dekat terhadap sekelompok orang/budaya/masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif (Afifuddin, 2009). Observasi partisipatoris merupakan upaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebiasaan dan budaya orang atau kelompok yang diteliti.

Selanjutnya dalam Pengabdian Kepada Masyarakat tim melakukan 4 (empat) tahap yaitu tahap persiapan, tahap perancangan, tahap sosialisasi dan tahap asistensi.



Gambar 3: Tahapan Pendampingan Menuju Desa Wisata Banjarsari (Sumber: Data diolah, 2024)

Tahap persiapan. Sebagai langkah awal, tim pengabdian melakukan koordinasi lintas sector mulai koordinasi dengan Lurah dan juga koordinasi dengan Pokdarwis Mustika Banjar. Koordinasi ini

dilakukan untuk mendapatkan cara pandang yang sama atas rencana pembangunan Desa Wisata.

Tahap kedua yaitu tahap Perancangan. Pada tahapan ini tim pengabdian merancang dan

menentukan dua objek Wisata yang akan dijadikan objek pariwisata. Melalui diskusi yang cukup intens disepakati bahwa dua (2) lokasi yang menjadi Tanah Kas Desa yaitu Watu Tumpang dan Puncak Sigong. Untuk Watu Tumpang tim hanya akan melakukan pendataan sederhana. Sedangkan untuk Puncak Sigong akan mendapatkan perhatian lebih besar mengingat lahan yang cukup luas dan suasana pegunungan yang sejuk dan asri.

Tahap ketiga yaitu sosialisasi. Sosialisasi akan terus dilakukan khususnya kepada masyarakat sekitar yang terdapat langsung dengan aktifitas kepariwisataan nantinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat atas kunjungan wisatawan yang akan datang nantinya.

Tahap ke-empat yaitu asistensi atau pendampingan. Tim pengabdian akan melakukan pendampingan atas pembangunan Desa Wisata. Selain melakukan pendampingan atas pembangunan di kedua objek Wisata, tim juga akan melakukan pendampingan atas pembentukan Peraturan kalurahan yang akan menjadi payung hukum dalam pembangunan Desa Wisata. Disamping pendampingan pembangunan dan legalisasi, tim juga akan melakukan pendampingan manajerial kepada Pokdarwis agar pengelolaan Desa Wisata sesuai dengan rencana awal.

Hasil dan Pembahasan

Setelah melakukan serangkaian observasi dan pengumpulan data serta informasi, tim menemukan terdapat 2 (dua) objek wisata alam yaitu Watu Tumpang dan Puncak Sigong. Khusus untuk objek Watu Tumpang, tim pengabdian menilai bahwa lokasi tersebut tidak cocok untuk dijadikan objek Wisata berskala besar mengingat lahan yang sangat terbatas dan berada di pinggir jalan. Tanah Kas Desa yang menjadi area Watu Tumpang berkisar 150 meter sehingga sulit untuk ditambah amenities seperti toilet permanen maupun gazebo maupun bangunan sejenis. Tim hanya menyarankan untuk melakukan revitalisasi terhadap lokasi sehingga lokasi sekitar Watu Tumpang lebih aman dan nyaman untuk dijadikan lokasi Baritan.

Sekedar untuk diketahui bahwa masyarakat sekitar mengadakan Baritan berupa upacara adat yang dilakukan setahun sekali. Baritan merupakan ritual adat masyarakat setempat sebagai wujud syukur atas panen yang mereka dapatkan setahun sekali yang biasanya dilakukan pada bulan Dzulqadha dengan mengambil hari pasaran Jumat Kliwon.



Gambar 4: Watu Tumpang, Lokasi Baritan Masyarakat Banjarsari Samigaluh
(Sumber: Dokumen Pribadi, 2024)

Lokasi kedua milik Kalurahan Banjarsari adalah Puncak Sigong. Lokasi ini merupakan Tanah Kas Desa (TKD) yang luasannya mencapai 2 hektar. Puncak Sigong merupakan dataran tinggi yang dikelilingi oleh perbukitan dengan udara yang segar dan pemandangan yang sejuk ala pegunungan.

Jika malam hari, mata akan dimanjakan dengan gemerlapnya ibukota Kecamatan Samigaluh

yang berada di bawah. Saat ini sudah ada beberapa amenities yang dibangun oleh Pemerintah kalurahan Bersama warga sekitar berupa pendopo dan beberapa tempat duduk santai. Pendopo yang dibangun tersebut saat ini sudah dapat digunakan untuk beberapa pertemuan sebagaimana yang dilakukan oleh tim pengabdian pada saat melakukan

sosialisasi atas rencana pembentukan Desa Wisata Banjarsari.

Pendopo dibangun menggunakan kayu dengan atap dari genting tanah menambah suasana sejuk. Pendopo yang dibangun saat ini mampu

menampung sekitar 50 orang sebagaimana terlihat dalam Gambar 5 berikut ini.



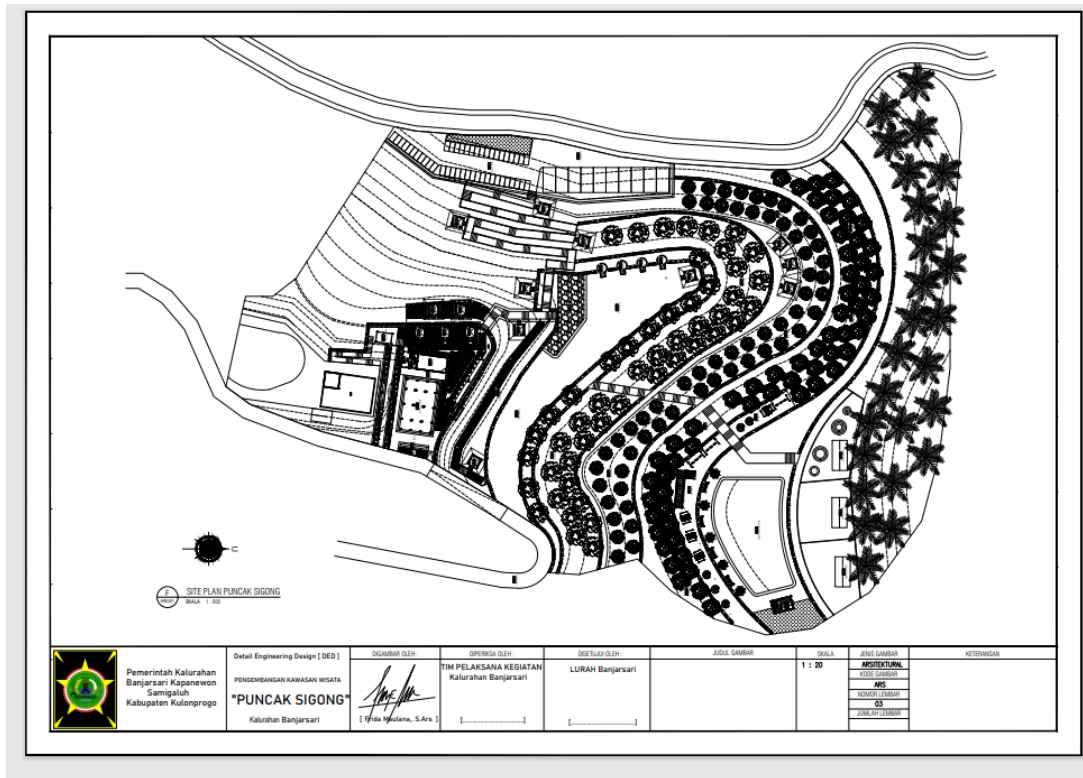
Gambar 5: Sosialisasi Rencana Pembentukan Desa Wisata Banjarsari
(Sumber: Dokumen pribadi, 2024)

Diarea Puncak Sigong rencananya akan dibangun beberapa amanitas yang akan mendukung aktifitas pariwisata. Diantara amanitas yang akan dibangun di Puncak Sigong antara lain: gazebo, spot-spot yang instagramabel, kolam mini sebagai aktifitas tambahan bagi anak anak, beberapa kandang hewan peliharaan (mini zoo), toilet, musholla dan beberapa amanitas lainnya.

Sebagai destinasi Wisata yang berada di ketinggian, selain pemandangan yang sejuk dan nyaman, diperlukan beberapa amanitas lain sebagai pendukung. Beberapa amenitas tersebut antara lain:

Pendopo, Dapur, Musholla, Gazebo, Kolam Mini, Mini zoo, Area Parkir dan beberapa spot foto/Foto booth.

Secara lebih detail beberapa pendataan Kawasan Puncak Sigong tergambar dalam Siteplan berikut:



Gambar 6: Site Plan Puncak Sigong
(Sumber: Data Diolah, 2024)

Petaan Kawasan Puncak Sigong merupakan langkah utama (Dewi Nurwati, 2020) mengingat Puncak Sigog menjadi destinasi utama Desa Wisata Banjarsari. Harapannya ketika semua aktifitas kepariwisataan terkumpul di lokasi ini sehingga perhatian Pokdarwis akan terfokus.

Disamping pendataan objek Wisata yang ada di Banjarsari khususnya Puncak Sigong, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga perlu dilakukan pendataan dan pembenahan. Pendataan tersebut utamanya adalah pelibatan tokoh-tokoh masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh adat. Pelibatan seluruh stakeholder akan memberikan kepastian dan menjaga keberlangsungan atas aktifitas kepariwisataan di Banjarsari.

Simpulan dan Saran

Berangkat dari kondisi objektif yang ditemukan selama melakukan pendampingan, tim pengabdian menyimpulkan beberapa hal:

1. Masyarakat sangat berharap ada upaya riil yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Banjarsari dalam menggerakkan ekonomi warga. Pembangunan Desa Wisata menjadi salah satu alternative yang dapat dilakukan mengingat situasi dan kondisi Kalurahan Banjarsari yang berada jauh dari kota dan berada di perbatasan antar provinsi.
2. Pemerintah Kalurahan Banjarsari telah berupaya melakukan pembangunan Desa Wisata dengan membangun beberapa

- aminitas objek Wisata namun belum terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.
3. Pemerintah Kalurahan telah membentuk Pokdarwis sebagai pengelola Desa Wisata namun belum melibatkan tokoh-tokoh setempat.
4. Dukungan dari Pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf belum ditindaklanjuti sehingga perlu dibuat Grand Design atau Masterplan Desa Wisata.

Sedangkan saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah Kalurahan Banjarsari perlu segera membuat Peraturan Kalurahan yang menjadi payung pembangunan Desa Wisata.
2. Perlu melakukan revitalisasi Kelompok Sadar Wisata yang ada saat ini dengan melibatkan tokoh-tokoh sekitar objek Wisata.

Daftar Rujukan

- Afifuddin, B. A. S. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Atmajha, M. C., Muhammad, A. S., Suswaini, E., Puspitasari, C., Mardhika, J. G., Maritim, U., Ali, R., Desa, K., & Desa, P. (2022). Sistem Informasi Manajemen Desa, Menuju Desa Mandiri. *Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 257–263.
- Dewi Nurwati, A. S. M. dan E. S. (2020). Analisis Jejaring Pelaku Pariwisata Di Kabupaten

- Bintan : Studi Pada Event Ironman Bintan. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena*, 1(1), 62–169.
- Muhammad, A. S., Swastiwi, A. W., & Suswaini, E. (2022). Optimization of Local Potential Towards Nature And Culture-Based Tourism Village (Study on Charcoal Kitchens and Mangrove Forests in Kuala Sempang Village , Bintan Regency). *Journal of Public Administration and Governance*, 12(1), 179–189.
<https://doi.org/10.5296/jpag.v11i4.19514>
- Oktaviana, R. F., Muhammad, A. S., Kurnianingsih, F., & Mahadiansar, M. (2021). *Internal Condition Analysis on Tourism Development of Bintan Regency 2019*.
<https://doi.org/10.36256/ijtl.v2i1.129>
- Rahmah, W. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Dan Budaya Objek Wisata Sungai Hijau Terhadap Masyarakat Di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. *JOM FISIP Vol. 4 No. 1 - Februari 2017*, 4(1), 1–16.
- Sugianto, A. (2016). Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Karang Patihan Kecamatan Balong 1 Ponorogo. *Ekuilibrum : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 11(1), 56.
<https://doi.org/10.24269/ekuilibrum.v11i1.113>
- Sutrisno, S., Buddhi Satyarini, T., & Iman, M. (2018). Perintisan Desa Wisata Berbasis Alam dan Budaya di Seloharjo, Pundong, Bantul Yogyakarta. *BERDIKARI : Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(1), 16–28.
<https://doi.org/10.18196/bdr.6130>